

FILSAFAT POLITIK IBNU RUSYD

Halimatuzzahro

halimatuzzahro11@gmail.com

Abstract

During this time Ibn Rushd is known for his Aristotelian philosophy, he is also the greatest commentator on the works of Aristotle. In his political philosophy we will find different things, because in political philosophy he commented on *the Republic* rather than Aristotle's *Politics*. In his political book which is a commentary of Plato's *Republic* namely *a-arûri fi as-Siyâsah*, Ibn Rushd has more in common with Plato than with Aristotle. Nevertheless, Ibn Rushd continued to use the demonstrative method he obtained from Aristotle as a guide in commenting on *the Republic*. In addition, Ibn Rushd's political book is also born of the reality of government that he considered not good. This made Ibn Rushd's political book not only an academic one, but a response to the political situation of his time. His great name as a Muslim philosopher and also a faqih is still clearly visible in his political work which has shari'ah nuances. His ability to make Shari'ah one of the foundations of good and right government made him different from the two Greek philosophers.

Keywords: Political philosophy, Aristotle, Plato, Ibnu Rusyd.

Abstrak

Selama ini Ibnu Rusyd dikenal dengan filsafatnya yang beraliran Aristotelian, Ia juga merupakan komentator terbesar atas karya-karya Aristoteles. Dalam filsafat politiknya kita akan menemukan hal berbeda, karena dalam filsafat politik ia mengomentari *Republic* bukan *Politics* Aristoteles. Dalam kitab politiknya yang merupakan komentar dari *Republic* Plato yaitu *a-arûri fi as-Siyâsah*, Ibnu Rusyd memiliki lebih banyak kesamaan dengan Plato dibanding dengan Aristoteles. Walaupun demikian, Ibnu Rusyd tetap menggunakan metode demonstratif yang ia dapat dari Aristoteles sebagai pegangan dalam memberikan komentar terhadap *Republic*. Selain itu, buku politik Ibnu Rusyd juga terlahir dari realita pemerintahan yang ia anggap tidak baik. Hal tersebut menjadikan buku politik Ibnu Rusyd bukan hanya merupakan komentar yang bersifat akademik saja, tetapi merupakan sebuah respon dari keadaan politik pada masanya. Nama besarnya sebagai seorang filsuf muslim dan juga seorang *faqih* masih terlihat jelas dalam karya politiknya yang memiliki nuansa syari'at. Kemampuannya untuk menjadikan syari'at sebagai salah satu pondasi pemerintahan yang baik dan benar menjadikannya berbeda dengan kedua filsuf Yunani tersebut.

Kata Kunci: Filsafat politik, Aristoteles, Plato, Ibnu Rusyd.

A. Pendahuluan

Kajian yang membahas tentang Ibnu Rusyd telah banyak sekali dilakukan, hanya saja dari kajian tersebut, belum banyak yang fokus membahas pemikiran filosofis Ibnu Rusyd dalam ranah politik.¹ Ibnu Rusyd memang belum banyak dikenal sebagai seorang pemikir politik, karena selama ini ia lebih banyak dipotret sebagai seorang filosof, teolog dan *faqih*. Jika kita membaca dengan seksama filsafat politik Ibnu Rusyd, kita akan berpendapat bahwa ia sebenarnya memiliki filsafat politik yang runtut. Dalam bidang politik, Ibnu Rusyd menulis sebuah karya yang berjudul *al-arûdri fi al-Siyâsah: Mukhtacar Kitâb al-Siyâsah li Aflâmûn* yang merupakan komentar dari buku “*Republic*” karya Plato. Dalam ranah politik Islam, umumnya kita mengenal nama-nama seperti al-Mawardi,² Ibnu Abi Rabi’,³ al-Maududi⁴ dan lain-lain yang merupakan

¹ Dewasa ini, ada beragam diskursus yang berkenaan dengan politik, diantaranya: ilmu politik, pemikiran politik, filsafat politik, teori politik, dan etika politik. Filsafat politik adalah aspek teoritis dari ilmu politik. Apabila ilmu politik berurusan dengan masalah aktual dan penjelasannya melalui prosedur analisis empiris, filsafat politik berurusan dengan pokok konseptual yang merajut keseluruhan fenomena politik di berbagai zaman. Filsafat politik membahas, misalnya, asal-usul konsep kedaulatan dalam kaitannya dengan konsep-konsep lain seperti otoritas, legitimasi, kekuasaan dan representasi. Istilah “filsafat politik” kerap juga digantikan dengan istilah “filsafat politik” atau “teori politik”. Hanya saja, dalam arti tertentu, “filsafat politik” dapat juga diartikan sebagai bentuk “filsafat politik” yang lebih abstrak, misalnya pembahasan konseptual tentang (atau “analisis logis” atas) kedaulatan, representasi, suara dan sebagainya. Namun yang lebih sering terjadi adalah penyamaan antara “filsafat politik” dan “filsafat politik”. Lihat selengkapnya Martin Suyrajana, *Sejarah Filsafat politik Klasik: Dari Prasejarah Hingga Abad ke-14 M* (Tangerang: Marjin Kiri, 2016), 4.

Dalam pengertian lain disebutkan bahwa filsafat politik merupakan refleksi kritis mengenai bagaimana sebaiknya kita mengatur kehidupan kolektif kita, sebagaimana yang diselenggarakan dalam lembaga-lembaga politik dan pranata-pranata sosial, seperti pemerintahan, sistem ekonomi dan pola kehidupan keluarga. Lihat Budiono dan Kusumohamidjono, *Filsafat Politik Abad ke-21* (Yogyakarta: Jalasutra, 2014), 10.

Pemikir klasik menanggapi hubungan antara “filsafat politik” dan “ilmu politik” bukan sebagai pemikiran antara satu bidang penelitian dengan bidang yang lain, melainkan antara cara dan tujuan. Contoh, filsuf politik boleh jadi menganggap bahwa tujuan puncak negara adalah menciptakan lingkungan sosial dan kultural dimana setiap individu memiliki sarana material dan pendidikan untuk memaksimalkan potensi-potensinya. Tetapi bagaimana sarana-sarana mesti diseleksi untuk mencapai tujuan adalah ranah dari ilmu politik. Lihat Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern* terj. Ahmad Baidlowi dan Imam Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4-6. Lain halnya dengan etika politik yang membahas filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Lihat Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia, 2016), 1.

² Nama lengkap ilmuan Islam ini adalah Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bashri, hidup antara tahun 364 H atau 975 M sampai 450 H atau 1059 M. Dia seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi’i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Dalam filsafat politiknya, menurut al-Mawardi, imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Menurut al-Mawardi pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu *ahlal Ikhtiyar* atau orang yang berwenang memilih kepala negara, dan *ahl-Imamah* atau orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara. Lihat selengkapnya Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Filsafat politik Islam: Masa Klasik Hingga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 18.

³ Ibnu Rabi’ adalah seorang pemikir politik Islam yang hidup di zaman kekhalifahan Abbasiyah. Ia menulis sebuah buku yang berjudul *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik* (Perilaku Raja dalam Mengelola Kerajaan-kerajaan). Buku tersebut ia persembahkan kepada Mu’tashim, Khalifah Abbasiyah kedelapan

beberapa pemikir yang telah banyak menyumbangkan idenya dalam politik Islam. Masing-masing dari pemikir politik Islam tersebut memiliki pemikirannya sendiri tentang konsep pemerintahan, negara atau pun konsep pemimpin.

Komentar Ibnu Rusyd terhadap karya politik Plato terdengar janggal, pasalnya, Ibnu Rusyd dikenal sebagai seorang Aristotelian yang rasionalis empiris, tetapi dalam bidang politik justru tertarik dengan filsafat politik Plato yang dikenal sebagai filsuf yang idealis utopis. Menurut Oliver Leaman, dalam masalah politik, Islam cenderung memiliki hubungan yang jauh lebih kuat dengan Plato dibandingkan dengan muridnya Aristoteles.⁵ Inilah titik perbedaan yang sangat penting antara filsafat politik Islam dan berbagai aliran politik yang berkembang di Eropa Kristen pada Abad Pertengahan. Pada umumnya, para *falâsifah* tidak terlalu kagum dengan Plato dibanding dengan muridnya Aristoteles yang dijuluki *al-Syaikh al-Rais*. Namun sebenarnya, sepanjang penafsiran kalangan Neoplatonis, Plato dan Aristoteles memiliki banyak kesamaan. Filsafat politik Plato luas didiskusikan hanya karena karya-karya politiknya mudah diakses. Ibnu Rusyd juga mengatakan bahwa alasan ia mengomentari *Rapublic* Plato hanya karena *Politics* Aristoteles belum sampai di tangannya.⁶ Banyak *falâsifah* yang mencoba mendiskusikan karya politik Aristoteles, tetapi gagal. Oleh *falâsifah* buku “*Republic*” karya Plato lazim dipandang sebagai kesimpulan politis dari *Nicomachen Ethics* karya Aristoteles. Menurut *falâsifah*, filsafat politik Plato yang tersusun secara lebih ideal lebih tepat diterapkan dalam konteks filsafat politik Islam.⁷ Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa komentar Ibnu Rusyd terhadap *Republic* Plato bukan hanya merupakan sebuah komentar yang bersifat akademik saja. komentar Ibnu Rusyd tersebut sangat erat kaitannya dengan politik praktis ketika Maghrib dan Andalusia, karena di dalamnya terdapat kritik terhadap pemerintahan pada masa itu.

yang memerintah pada abad IX Masehi. Karena alasan inilah buku tersebut berisikan ide politik yang mendukung sistem monarki turun temurun Abbasiyah. Sebagaimana Plato, Ibnu Abi Rabi' berpendapat bahwa manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan yang lain, oleh karenanya manusia saling memerlukan. Bedanya, Ibnu Abi Rabi' menambahkan pengaruh akidah dan agama dalam filsafat politiknya. Ia mengatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan watak yang cenderung untuk berkumpul dan bermasyarakat dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa orang lain. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI press, cet ke-5, 2011), 43-44.

⁴ Abu A'la al-Maududi dilahirkan di Aurangabad (sekarang termasuk daerah India), pada tanggal 25 September 1903 M. Ayahnya bernama Ahmad Hasan, seorang pengacara yang pernah belajar di Universitas Aligarh. Pada tahun 1919 ayahnya meninggal dunia, dan oleh karenanya ia terpaksa meninggalkan bangku kuliahnya. Karir al-Maududi diawali dari bidang kewartawanan, yakni sejak ia berusia 15 tahun. Pada tahun 1920, ia diangkat sebagai editor surat kabar berbahasa Urdu, Taj, yang terbit di Jabalpure. Karena prestasinya, setahun berikutnya ia diangkat menjadi pemimpin editor di sua surat kabar Muslim (1921-1923) dan surat kabar *al-Jam'iyat-Ulum-i Hind* (1921-1928). Lihat selengkapnya Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 168-169.

⁵ Oliver Leaman, *Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis*, laih bahasa Musa Kazhim dan Arief Mulayadi (Bandung: Mizan, 2002), 140-141.

⁶ Raphl Lerner, *Averroes on Plato's Republic* (New York, Cornell University Press, 1974), viii. Lihat juga Erwin Rosenthal, “The Place of Politics in the Philosophy of Ibn Rushd”, *SOAS: Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London*, Vol, 15, Nomor 2, 1953, 266.

⁷ Oliver Leaman, *Pengantar Filsafat Islam*, 140-141.

Ibnu Rusyd dengan corak filsafatnya yang bersifat rasional berupaya untuk merekonstruksi pemikiran keilmuan Islam, ini terlihat dalam usahanya mengomentari karya-karya Aristoteles dan pembelaannya terhadap filsafat. Dalam mengomentari karya Plato pun Ibnu Rusyd masih menggunakan metode demonstratif ala Aristoteles sebagai pegangan. Ibnu Rusyd adalah salah satu filsuf yang berpendapat bahwa agama dan filsafat tidak bertentangan. Pendapat tersebut disampaikan dalam sebuah buku tipis yang berjudul *Faql al-Maqâl fi mâ Baina al-Hikmah wa al-Syari'ah min al-Ittishâl*, dan juga sanggahannya terhadap kitab *Tahâfut al-Falâsifah* yang ditulis al-Ghazali. Hal ini menjadi penting dalam rangka memberikan argumen bahwa filsafat politik Islam tidak hanya bersifat *divine* tetapi juga merupakan bangunan pemikiran yang rasional.⁸

B. Ibnu Rusyd: Riwayat Hidup dan Karyanya

Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rusyd, adalah salah satu filsuf besar Islam yang lahir di Cordoba, Andalusia pada tahun 520 H/ 1126 M. Ibnu Rusyd berasal dari keluarga terhormat dan terkenal dengan keilmuannya. Kakek dan ayahnya adalah seorang *qâi* di Cordoba dan juga seorang *faqih* terkenal dari mazhab Maliki. Ibnu Rusyd lahir empat tahun setelah khalifah Bani Muwahidun Muhammad bin Tumart meninggal dunia pada tahun 524 H.⁹

Ibnu Rusyd tumbuh dan hidup dalam keluarga yang memiliki *ghirah* besar dalam bidang keilmuan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang melapangkan jalannya menjadi seorang ilmuwan. Namun faktor yang paling berpengaruh dalam keberhasilannya tidak lain karena kegeniusan dan ketajamannya dalam berfikir. Atas dasar itulah Ibnu Rusyd dapat menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan seperti hukum, filsafat, kedokteran, astronomi, sastra Arab dan lainnya. Hampir seluruh hidupnya ia dedikasikan untuk belajar dan membaca. Menurut Abbas al-'Aqqad, Ibnu Rusyd tidak pernah meninggalkan berfikir dan membaca kecuali pada malam ayahnya meninggal dan malam pernikahannya.¹⁰

Ibnu Rusyd mempelajari ilmu kedokteran dari Abu Ja'far Harun dan Abu Marwan bin Jurbul al-Balnasi, sedangkan ilmu kalam ia pelajari dari Ibnu Thufail.¹¹ Pada masa

⁸ Menurut Fuad Mohd. Fachruddin, untuk melihat Islam dari dekat dan untuk mendekatkan diri kepada Islam harus diketahui dasar-dasar yang menjadi prinsip hidup dalam dan bagi agama ini (*the creative spirit and elements*). Ia menuliskan bahwa Islam bukanlah kumpulan pemikiran yang bertebaran, berserak dan bercerai-berai, tetapi merupakan ajaran yang utuh tersusun rapi (*complete fundamental concepts*). Agama ini berbentuk kesatuan (*uniform system*) yang mengumpulkan segala bahan hidup, kehidupan dan penghidupan yang diperlukan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Lihat Fuad Mohd. Fachruddin, *Filsafat Politik Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), 6.

⁹ Abu al-Walid Ibnu Rusyd, *Fashlu al-Maqal fima baina al-Hikmah wa al-Syari'ah min al-Ittishal* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1972), 1. Lihat juga Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filsuf dan Filsafatnya* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 221. Lihat juga Hamadi al-Ubaidi, *Ibnu Rusyd wa 'Ulum al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Dar Fikr al-'Arabi, 1991), 9. Lihat juga Tariq Suwaidan, *Dari Puncak Andalusia* terj. Zainal Arifin (Jakarta: Zaman, 2015), 479.

¹⁰ Abbas Mahmud 'Aqqad, *Ibn Rusyd*, cet. Ke-6 (Kairo: Dar al-Ma'arif), 19. Lihat juga Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*, 222.

¹¹ Ada yang berpendapat bahwa Ibnu Thufail bukanlah guru dari Ibnu Rusyd, karena tingkat keilmuan yang dimiliki Ibnu Rusyd melampaui kemampuan intelektual Ibnu Thufail tetapi yang jelas,

hidupnya, Ibnu Rusyd pernah menjabat dua kali sebagai *qâi*, pertama ia menjabat *qâi* di Seville pada tahun 1169, kemudian menjadi *qâi* al-*quat* di Cordoba pada tahun 1171.¹² Ibnu Rusyd merupakan ‘sahabat’ dari gurunya Ibnu Thufail yang ketika itu menjabat sebagai tabib istana, itu terbukti ketika Ibnu Thufail yang sudah tua mengajukan permohonan kepada khalifah Abu Ya’qub Yusuf agar mengangkat Ibnu Rusyd untuk menggantikannya menjadi tabib istana. Walaupun Ibnu Rusyd sangat dekat dengan Ibnu Thufail, tetapi pengaruh mazhab *isyraqi* Ibnu Thufail tidak begitu banyak terhadap pemikiran Ibnu Rusyd, justru pemikiran filsafat Ibnu Rusyd terpengaruh oleh filsafat Ibnu Bajjah.¹³ Menurut Majid Fakhry, hal ini dikarenakan Ibnu Bajjah adalah seorang filsuf yang memperkenalkan studi terhadap pemikiran Aristoteles di Andalusia, yang mana ke depannya Ibnu Rusyd banyak dikenal sebagai komentator handal Aristoteles.¹⁴

Perjalanan karir Ibnu Rusyd tidaklah mulus dan lancar. Saat permulaan pemerintahan Khalifah Ya’qub ibnu Yusuf (554 H- 595 H/ 1160 M-1199 M) yang menggantikan ayahnya, Yusuf Ibnu Muhammad ‘Abd al-Mukmin, Ibnu Rusyd tetap menerima kehormatan dan jabatan. Akan tetapi pada tahun 1195 M ia dituduh kafir, diadili dan diasingkan ke Lucena dekat Cordoba serta dicopot dari segala jabatannya oleh khalifah. Fitnah yang dituduhkan kepada Ibnu Rusyd ini datang dari para ulama konservatif karena kecemburuan mereka terhadap kedudukan Ibnu Rusyd yang tinggi. Beruntung masa getir tersebut tidak berlangsung lama, hanya satu tahun. Pada tahun 1197 M, khalifah mencabut hukumannya dan posisinya dalam pemerintahan direhabilitasi kembali. Namun tidak lama setelah itu, pada tanggal 10 Desember 1198 M/ 9 Shafar 595 H Ibnu Rusyd menghembuskan nafas terakhirnya di Marakesh dalam usia 72 tahun.¹⁵ Dalam hidupnya Ibnu Rusyd memiliki anak yang berprofesi sebagai seorang dokter ia bernama Abu Muhammad ‘Abd Allah. Selain menjadi dokter ia juga menguasai bidang manufaktur. Beberapa putranya yang lain tekun mendalami ilmu fikih dan bekerja di pengadilan Couer.¹⁶

Walaupun Ibnu Rusyd memiliki kesibukan yang banyak di pemerintahan dan juga menjabat sebagai tabib istana, Ibnu Rusyd tidak pernah lupa untuk membaca dan menulis. Selama hidupnya, Ibnu Rusyd telah melahirkan karya-karya yang tidak hanya berkaitan tentang filsafat, tetapi Ibnu Rusyd juga memiliki tulisan dari beberapa subyek yang lain seperti, kedokteran, hukum, sastra dan lain-lain. Ibnu Rusyd terkenal sebagai

mereka merupakan sahabat. Lihat Hamadi al-Ubaidi, *Ibnu Rusyd wa ‘Ulum al-Syari’ah al-Islamiyah* (Beirut: Dar Fikr al-‘Arabi, 1991), 10.

¹² Abu al-Walid Ibnu Rusyd, *Fashlu al-Maqal fima baina al-Hikmah wa al-Syari’ah min al-Ittishal* (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1972), 2.

¹³ Ibnu Bajjah (ابن باجة) atau lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin ash-Shayigh at-Tujibi bin Bajjah (أبو بكر محمد بن يحيى بن الصايغ) adalah seorang astronom, filsuf, musisi, dokter, fisikawan, psikolog, botanis, sastrawan, dan ilmuwan Muslim Andalusia yang dikenal di Barat dengan nama Latin Avempace. Ia lahir di Zaragoza, tempat yang kini bernama Spanyol, dan meninggal di Fez pada 1138.

¹⁴ Majid Fakhry, *Averroes: His Life, Works and Influence* (England: Oxford, 2001), 1.

¹⁵ Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filsufdan Filsafatnya* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 224.

¹⁶ Abu Walid Ibnu Rusyd, *Tahafut al-Tahafut*, terj. Khalifurahman Fath (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 2-3.

komentator handal dari Aristoteles, termasuk “*Politics*” karya Aristoteles. Jenis komentar ini terbagi menjadi tiga: komentar panjang (*tafsir*), komentar sedang (*syarh*), dan komentar pendek (*jawami*) atau disebut juga *pharapruse*.¹⁷ Komentar Ibnu Rusyd yang berbentuk *jawami* terdapat pada karya Aristoteles *Physic, the Metaphysic, De Anima, De Coelo* dan *Anletyca Posteriora*. Ibnu Rusyd juga menulis beberapa komentar dari buku *De Intellectu* karya Alexander dari Aprodiasias, *Metaphysics* karya Nicolas dari Damaskus, *Isagoge* karya Porphyry dan *Almajest* karya Ptolemy.¹⁸

Menurut Majid Fakhry, dalam bidang filsafat dan ilmu kalam, Ibnu Rusyd telah menulis buku trilogi yang hingga saat ini tidak ada habisnya untuk dikaji. Pada tahun 1180 ia menulis *Tahafut al-Tahafut (Incoherence of the Incoherence)* kurang lebih 69 tahun setelah wafatnya Imam al-Ghazali, yang mana buku ini lahir sebagai respon atas buku yang ditulis al-Ghazali yaitu *Tahafut al-Falasifah (Incoherence of the Philosophers)*. Buku kedua dari trilogi ini adalah *Fash al-Maqal fi ma Baina al-Hikamah wa al-Syari’ah min al-Ittishal* (1178), buku ini lahir karena usahanya dalam mendamaikan antara filsafat dan agama, dan *al-Kasyf ‘an Manahij al-Adillah* (1179). Dalam bidang lain seperti kedokteran, Ibnu Rusyd telah menulis buku yang berjudul *al-Kulliyat* atau di Barat dikenal dengan *Colligent*. Tidak ketinggalan juga Ibnu Rusyd menulis beberapa kitab dari bidang hukum dan fiqh seperti *al-Mustasyfa (Gist of Jurisprudence)* dan *Bidayat al-Mujtahid*.¹⁹ Selain yang telah disebutkan di atas, Ibnu Rusyd juga banyak menulis komentar dan interpretasi terhadap kitab-kitab ulama sebelumnya, serta beberapa kitab-kitab kecil lainnya.

C. Kota Utama (*Al-Madīnah al-Fāilah*) dalam Filsafat Politik Ibnu Rusyd

Pembahasan tentang kota utama (*al-Madīnah al-Fāilah*) memang lebih identik dengan filsafat politik al-Farabi atau Plato. Selain kedua filsuf tersebut, Ibnu Rusyd juga menawarkan konsep negara ideal yang menurutnya baik untuk diterapkan. Menurut Richard Walzer, pemikiran politik pada masa awal memang terfokus kepada diskursus tentang negara ideal. Hanya saja, terkadang dalam diskursus ini tidak melihat kepada realitas dan masalah-masalah yang ada dalam negara, juga tidak membahas bagaimana seharusnya menjadikan suatu negara itu dapat bertahan. Biasanya para

¹⁷ Majid Fakhry, *Averroes: His Life, Works and Influence* (England: Oxford, 2001), 3. Dalam kitabnya *Talkhis al-Siyasah* Ibnu Rusyd menjelaskan perbedaan tiga jenis komentar ini. Pertama, *Jawami* atau paraphrase adalah komentar pendek yang di pembicaraannya berasal dari Ibnu Rusyd sendiri. Kedua, *Talkhis* atau komentar sedang dimana Ibnu Rusyd menuliskan beberapa paragraf dari perkataan Aristoteles kemudian ia memberikan penjelasan dari pemahamannya sendiri. Contohnya seperti dalam kitab *Repulik* yang ditulis Plato, di awal ia menulis (Plato berkata) kemudian Ibnu Rusyd menjelaskan maksud paragraf tersebut, setelah itu ia memberikan penjelasan dan solusi atas permasalahan yang disampaikan tanpa menuliskan solusi tersebut berasal dari dirinya atau Plato. Ketiga, *Syarh* atau *Tafsir* dalam komentar ini Ibnu Rusyd menuliskan *nash* dari Aristoteles kemudian ia memberikan komentar dengan jelas dan panjang, dalam komentar ini ia membedakan ide dari dirinya sendiri dan ide dari Aristoteles. Lihat Abu Walid Ibnu Rusyd, *Talkhis al-Siyasah* (Beirut: Dar al-Thali’ah, 1998), 9.

¹⁸ Majid Fakhry, *Averroes: His Life, Works and Influence* (England: Oxford, 2001), 3.

¹⁹ *Ibid.*, 3-4.

pemikir politik hanya memberikan penilaian mereka tentang bentuk negara yang ideal menurut teori mereka sendiri, tidak terkecuali Plato dalam *Republic*-nya.²⁰

Ibnu Rusyd dan Plato memang tidak memberikan definisi dari negara ideal yang dimaksudkannya. Masing-masing pemikir tersebut dalam kitabnya memberikan konsep dan komponen-komponen yang membentuk suatu negara yang ideal dalam pandangan mereka. Dalam *Republic* Plato misalnya, hal pertama yang harus diterapkan di dalam negara ideal adalah konsep keadilan yang benar. Menurutny, keadilan terwujud di dalam kota utama apabila masyarakat kota utama melakukan pekerjaan mereka masing-masing sesuai dengan spesialisasi mereka. Ibnu Rusyd juga memiliki definisi yang sama dengan Plato tentang keadilan.²¹ Walaupun dalam filsafat politiknya Ibnu Rusyd mengomentari *Republic* Plato, tetapi ia masih menggunakan metode demonstratif Aristoteles sebagai pijakan.

1. Hubungan Etika dan Politik

Dalam pemikiran Plato (428-348 SM), kita menjumpai untuk pertama kalinya teori politik yang paling sistematis dalam sejarah pemikiran Yunani Klasik. Berbeda dari para pemikir politik sebelumnya yang kebanyakan hanya memberikan petuah komentar politik yang berserakan, Plato menghadirkan suatu visi politik yang integral dan komprehensif serta dilandaskan pada bangunan filsafat, mulai dari pendasaran antropologi filosofis sampai dengan pertimbangan metafisika.²² Jika kita membaca dengan seksama pemikiran politik Ibnu Rusyd, kita akan berpendapat bahwa ia juga memiliki pemikiran politik yang runtut. Bahkan dalam bidang politik ia menulis sebuah buku yang merupakan komentar dari *Republic* karya Plato, sebagaimana Ibnu Rusyd menulis komentar untuk muridnya Aristoteles.

Dalam pemikiran politiknya, selain mengomentari Plato, Ibnu Rusyd memiliki kesamaan dengan Aristoteles dalam hubungan antara etika dan politik. Dalam bukunya *a-arûri fi as-Siyâsah* Ibnu Rusyd memberikan penataan yang sistematis terhadap ilmu politik serta hubungannya dengan bidang keilmuan yang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aristoteles, Ibnu Rusyd membagi ilmu menjadi dua bagian, yaitu ilmu teoritis dan ilmu praktis. Ilmu teoritis adalah ilmu yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan manusia secara langsung, yaitu ilmu sebagai zat itu sendiri, seperti ilmu matematika, teknik, ilmu perbintangan, musik dan lain-lain. Sedangkan ilmu praktis, selain sebagai ilmu pengetahuan, ia juga mengandung tuntutan untuk melaksanakannya, jika tidak tercipta sebuah perbuatan maka ilmu tersebut tidak berarti.²³

²⁰ Richard Walzer, "Aspects of Islamic Political Thought: al-Farabi and Ibnu Khaldun", *Oriens*, vol. 16 Desember 1963, 40.

²¹ Muhammad Âbid al-Jâbiri, "Muqaddimah" dalam Abu Walid Ibnu Rusyd, *a-arûri fi as-Siyâsah* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiah, 1998), 50.

²² Martin Suyrajana, *Sejarah Pemikiran Politik Klasik: Dari Prasejarah Hingga Abad ke-14 M* (Tangerang: Marjin Kiri, 2016), 132.

²³ Abu Walid Ibnu Rusyd, *al-harûri fi al-Siyâsah: Mukhtashar Kitab al-Siyâsah li Aflâmûn*, terjemah dari bahasa Ibarani ke dalam bahasa Arab oleh Ahmad Syahlân (Beirut: Markaz Dirasât al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1998), 72-73.

Politik dan etika termasuk ke dalam bagian ilmu praktis,²⁴ yang mana menurut Ibnu Rusyd, ilmu politik tidak dapat berdiri sendiri, ia harus didasari dengan etika. Selanjutnya, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa dasar ilmu etika adalah ilmu jiwa yang di dalamnya ada “kehendak” dan “upaya” manusia.²⁵ Sedangkan ilmu jiwa termasuk ilmu *thabi’i* yang realisasinya terlihat dalam diri seorang manusia, seperti: bahagia, sedih, marah dan lain sebagainya.²⁶ Kesimpulannya adalah ilmu *thabi’i* mendasari terbentuknya etika, dan etika mendasari terbentuknya ilmu politik.

Upaya Ibnu Rusyd yang menghubungkan etika sebagai ilmu yang membicarakan persoalan manusia dalam rangka menacapai kesempurnaan dengan ilmu politik yang membicarakan tentang negara dalam kaitannya dengan mencari bentuk ideal, merupakan langkah strategis dalam konsep pemikiran politik Ibnu Rusyd. Sebagaimana Plato, Ibnu Rusyd menggambarkan manusia sebagai minatur “negara”. Negara sendiri menurut Ibnu Rusyd bukan mengarah kepada buminya, tanahnya, tempatnya, ataupun bangunannya. Negara yang dimaksud Ibnu Rusyd adalah penduduknya, masyarakatnya yang tidak dilihat dari wujud fisik saja, melainkan dilihat dari segi keberadaan mereka sebagai jiwa yang mencari kesempurnaan dalam masyarakat. Dengan demikian jelas terlihat bahwa etika merupakan ilmu yang menggambarkan tentang jiwa dari seorang individu, dan negara merupakan ilmu yang menggambarkan tentang jiwa secara *jama’ah*.²⁷ Ibnu Rusyd juga menambahkan bahwa, jika penerapan keadilan terhadap satu individu merupakan suatu hal penting, maka hal itu juga menjadi penting bagi masyarakat. Karena individu dan masyarakat adalah satu kesatuan bahwa mereka adalah “manusia”.

Hubungan etika dan politik bukan hanya karena keduanya merupakan bagian dari ilmu teoritis, melainkan bahwa keduanya secara tidak langsung membahas tentang jiwa manusia. Jiwa manusia sendiri terbentuk dari tiga kekuatan, yaitu kekuatan akal yang terletak pada fikiran atau kepala, kekuatan amarah yang terletak pada hati, dan kekuatan nafsu yang terletak pada perut. Menurut Ibnu Rusyd, negara juga memiliki ketiga kekuatan ini. Pemimpin adalah kepalanya, prajurit merupakan kekuatan pertahanan, petani dan para pekerja sebagai kekuatan yang menyediakan alat untuk bertahan hidup. Maka, jika keutamaan akal ada di kepala, seorang kepala negara haruslah orang yang memiliki wawasan yang luas, yang pada akhirnya akan melahirkan

²⁴ Ilmu etika membahas cara untuk mengelola jiwa agar sampai kepada tujuannya. Tidak jauh berbeda dengan ilmu politik yang membahas cara mengelola negara agar tercapai cita-cita bersama. Dalam hal ini etika dan politik sama-sama memiliki tujuan yang direalisasikan dalam hal praktis. Lihat Abu Walid Ibnu Ruysd, *a-arûri fi as-Siyâsah* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiah, 1998), 46.

²⁵ Abu Walid Ibnu Rusyd, *a-arûri fi as-Siyâsah* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiah, 1998), 46. Menurut Majid Fakhri, “kehendak” dan “upaya” manusia masuk ke dalam sub bagian etika yang pertama, dimana kedua dasar ilmu praktis tersebut adalah material pembangun etika dan dikembangkan dari dalam jiwa. Sub bagian yang kedua dari etika Ibnu Rusyd menurut Majid Fakhry ialah diperlukan cara untuk mengembalikan pemahaman tentang etika tersebut tatkala ia melemah atau menghilang. Lihat Majid Fakhry, *Averroes: His Life, Works and Influence* (England: Oxford, 2001), 98.

²⁶ Abu Walid Ibnu Ruysd, *a-arûri fi as-Siyâsah* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiah, 1998), 47.

²⁷ Abu Walid Ibnu Ruysd, *a-arûri fi as-Siyâsah* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiah, 1998), 47.

kebijaksanaan. Dengan alasan inilah Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kepala negara baiknya adalah seorang pemikir atau filosof.²⁸ Kekuatan amarah dalam jiwa manusia adalah untuk membangkitkan keberanian, maka para prajurit dalam sebuah negara haruslah dapat membela dan mempertahankan negaranya. Terakhir adalah kekuatan yang membantu semua aspek di atas seperti petani, nelayan dan pedagang yang menghasilkan makanan dan barang untuk bertahan hidup.²⁹

2. Retorika Sebagai Jalan Politik Ibnu Rusyd

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan suatu negara, untuk mewujudkan hal tersebut negara tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan dari masyarakat, begitu pula masyarakat memerlukan dukungan negara tempatnya bernaung. Masyarakat dan negara berjalan bersama untuk mewujudkan kebaikan bersama. Manusia pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dan pemahaman yang berbeda tergantung tingkat pendidikan dan lingkungannya, hal ini berpengaruh terhadap metode untuk menanamkan arti kebaikan dalam masyarakat. Secara garis besar, ada dua metode yang digunakan untuk menanamkan pemahaman terhadap masyarakat, metode yang bersifat persuasif dan metode yang bersifat paksaan. Membujuk masyarakat dengan cara retorikal dan puitis merupakan cara yang disarankan Ibnu Rusyd. Hal ini juga sesuai dengan apa yang pernah diterapkan oleh Plato dalam bukunya *Republic*, karena metode burhan atau demonstratif hanya berlaku untuk kalangan tertentu saja.³⁰

Metode persuasif yang telah dijelaskan di atas hanya berlaku bagi pemuda atau warga negara yang tumbuh dan besar dalam pengaruh lingkungan yang baik dan bijaksana, sedangkan untuk menerapkannya kepada masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan sulit. Menanggapi hal tersebut menurut Ibnu Rusyd jika berurusan dengan musuh atau orang yang tidak mempan dengan metode retorik dapat diterapkan metode kedua yaitu paksaan.³¹

Menurut Ibnu Rusyd, ada dua fungsi yang terdapat dalam metode retorik dan puitis. Pertama, untuk membangun opini masyarakat sehingga memungkinkan tercapainya suatu kebaikan. Kedua, sesuai dengan yang terdapat dalam *Republic*

²⁸ Menganggap filosof sebagai pemimpin negara yang ideal adalah salah satu kesamaan Ibnu Rusyd dengan Plato selain konsep tentang negara utama.

²⁹ Abu Walid Ibnu Ruysd, *a-arûri fî as-Siyâsah* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiah, 1998), 48.

³⁰ Majid Fakhry, *Averroes: His Life, Works and Influence* (England: Oxford, 2001), 106. Dalam *Fasl al-Maqal*, Ibnu Rusyd menjelaskan secara terperinci tiga metode yang digunakan dalam suatu dialog. *Pertama*, metode burhan atau metode demonstratif, yang terdiri dari premis-premis yang tidak terbantahkan. Metode pertama ini cocok diterapkan untuk sedikit orang seperti para filosof. *Kedua*, metode dialektik, metode berdialog secara kritis. Metode kedua ini cocok diterapkan untuk para teolog. *Ketiga*, retorik atau *khitabah*, metode ketiga ini cocok diterapkan kepada khalayak umum yang awam. Ibnu Rusyd dalam *Paraphrase of the Republic* mengganti metode dialektika dengan metode puitis. Lihat selengkapnya Abu al-Walid Ibnu Rusyd, *Fashlu al-Maqal fima baina al-Hikmah wa al-Syari'ah min al-Ittishal* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1972), 55-56. Lihat juga Michael Balustein, *The Scope and Methods of Rhetorical in Averroes' Middle Commentary on Aristotele's Rhetoric*, dalam *The Political Aspects of Islamic Philosophy* (Amerika Serikat: Harvard University, 1992), 267.

³¹ Majid Fakhry, *Averroes: His Life, Works and Influence* (England: Oxford, 2001), 106.

Plato bahwa retorika dan puisi dapat mengantarkan seseorang untuk menampilkan ciri-ciri kebaikan dan keindahan.³²

3. Karakteristik Pemimpin Menurut Ibnu Rusyd

Dalam kaitan politik dengan ilmu jiwa (yang melandasi etika) telah dijelaskan bahwa menurut Ibnu Rusyd seorang pemimpin seharusnya berasal dari kaum filosof.³³ Ia berpendapat, seorang pemimpin tidak diperkenankan memiliki kekayaan pribadi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan.

Selain itu, Ibnu Rusyd memeberikan beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, di antaranya adalah tidak mencintai ilmu pengetahuan, tidak suka mengumbar hawa nafsunya dan enggan untuk menumpuk harta berlebih.³⁴ Jika melihat kepada syarat-syarat pemimpin yang diajukan oleh Ibnu Rusyd di atas, beberapa di antaranya terkait dengan kritiknya terhadap pemerintahan yang akan kita bahas setelah ini. Seperti pada syarat ke lima dan ke enam, bahwa seorang pemimpin bukanlah seseorang yang suka mengumbar hawa nafsu dan menumpuk harta. Karena kedua sifat ini menjadi salah satu alasan terbesar jatuhnya suatu pemerintahan.

Selain itu, syarat yang pertama bagi seorang pemimpin adalah memiliki keilmuan yang mumpuni. Menurut Rosenthal, ilmu di sini bukan hanya ilmu politik, tetapi lebih mengarah kepada ilmu agama, khususnya dalam bidang *fiqh*. Penting bagi seorang pemimpin memiliki keilmuan lebih dalam bidang tersebut karena ia dituntut memiliki kemampuan untuk berjihad.³⁵ Dengan demikian, Ibnu Rusyd berharap bahwa seorang pemimpin kota utama dapat menegakkan sebuah politik yang berlandaskan syari'ah. Dalam *a-arûri fi as-Siyâsah*, Ibnu Rusyd menyejajarkan pengertian filsuf, raja, pembuat hukum (agama), dan imam. Ibnu Rusyd menyejajarkan imam dengan filsuf karena keduanya sama-sama seseorang yang ditiru dalam perbuatannya.³⁶

D. Degenerasi Politik sebagai Kritik

Upaya Ibnu Rusyd dalam merekonstruksi pemikiran dalam khazanah keilmuan Islam jelas terlihat dalam usahanya mengomentari karya-karya Aristoteles dan pembelaannya terhadap filsafat. Ibnu Rusyd adalah satu satu filsuf yang berpendapat bahwa agama dan filsafat tidak bertentangan. Hal ini jelas disampaikannya dalam sebuah buku tipis yang berjudul *Fasl al-Maqal fi ma Baina al-Hikmah wa al-Syari'ah*

³² Michael Balustein, *The Scope and Methods of Rhetorical in Averroes' Middle Commentary on Aristotele's Rhetoric*, dalam *The Political Aspects of Islamic Philosophy* (Amerika Serikat: Harvard University, 1992), 270.

³³ Abu Walid Ibnu Ruysd, *a-arûri fi as-Siyâsah* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiah, 1998), 135.

³⁴ bnu Ruysd, *a-arûri fi as-Siyâsah*, 137-138.

³⁵ Rosenthal, "The Place of Politics in the Philosophy of Ibn Rusyd", 259.

³⁶ Ibnu Rusyd, *al-harûri fi al-Siyâsah*, 136.

ولذلك فهذه الأسماء أشبهه بالمتواطئة، أعني الفيلسوف، و الملك و واضع السرائع و كذلك الإمام، لأن الإمام في اللسان العربي هو الذي يؤتم به في أفعاله. و من يؤتم به في هذه الأفعال هو الفيلسوف، إذن فهو الإمام بالإطلاق. (الفقرة ١٧٤).

min al-Ittishal, dan sanggahannya terhadap kitab *Tahafut al-Falasifah* yang ditulis al-Ghazali.

Dalam bidang politik, Ibnu Rusyd mengulas buku *Republic* karya Plato. Ia melihat kelemahan utama karya politik Plato tersebut terletak pada metode dialektika (*jadali*) yang digunakannya. Sebagai gantinya Ibnu Rusyd menggunakan metode analitis (*tahlili*) dan struktural (*tarkibi*) yang lebih sesuai dengan metode demonstratif (*burhan*) ala Aristoteles. Menurut Atif al-‘Iraqi, kritik Ibnu Rusyd terhadap metode dialektika tersebut dilatarbelakangi oleh kepercayaannya terhadap dasar-dasar yang logis lagi meyakinkan dan tidak menerima yang lain.³⁷ Dia mengajak kita untuk menggunakan metode demonstratif dalam mempelajari masalah-masalah filsafat dan menganggap metode ini sebagai ukuran penialain yang benar dan selamat. Berkaitan dengan hal tersebut, ia mengatakan bahwa hikmah merupakan sebuah penalaran terhadap segala sesuatu sesuai cara-cara pembuktian demonstratif.³⁸

Jika dilihat dari aspek historis, kitab *a-arûri fî as-Siyâsah* yang ditulis Ibnu Rusyd dengan *Republic* karya Plato masing-masing lahir dari keadaan sosial-politik yang berbeda. Keadaan tersebut menjadikan realitas-sosial yang dipotret dalam masing-masing buku tersebut pun berbeda. Plato dalam bukunya mengacu pada realitas-sosial yang terjadi pada kota-kota Yunani seperti Athena, Sparta atau yang lainnya. Sedangkan Ibnu Rusyd sendiri menjadikan realitas-sosial Arab-Islam menjadi sorotan.³⁹ Mungkin hal inilah menjadi alasan mengapa kedua pemikir ini menggunakan metode yang berbeda; Ibnu Rusyd dominan menggunakan metode demonstratif dan Plato menggunakan metode dialektika.

Paparan Plato tentang ragam bentuk negara adalah salah satu dari sekian pesona yang ada di dalam teks politik Plato. Pembahasannya dimulai dengan aristokrasi (pemerintahan oleh orang-orang terbaik) sampai timokrasi (pemerintahan berdasarkan martabat), oligarki (pemerintahan oleh beberapa gelintir orang), demokrasi (pemerintahan rakyat), dan tirani (pemerintahan oleh penguasa zalim). Di antara kelima model pemerintahan ini, Plato memilih Aristokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang ideal.⁴⁰

Berbeda dengan Plato, Aristoteles dalam *Politics*-nya mengakui bahwa ada tiga bentuk pemerintahan yang benar dan tiga bentuk pemerintahan yang menyimpang.⁴¹ Bentuk pemerintahan yang benar menurut Aristoteles adalah, Monarki, Aristokrasi dan pemerintahan konstitusional (*politeia*). Sedangkan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyimpang adalah, Tirani, Oligarki, dan Demokrasi.

³⁷ Muhammad Atif al-‘Iraqi, *Metode Kritik Filsafat Ibnu Rusyd*, alih bahasa Aksin Wijaya (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 49.

³⁸ Fauzan, “Pemikiran Politik Ibnu Rusyd”, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Filsafat*, Vol. 9, Nomor 2, Desember 2015.

³⁹ Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *Tragedi Intelektual: Perselingkuhan Politik dan Agama*, alih bahasa Zamzam Afandi Abdullah (Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003), 247-248.

⁴⁰ Oliver Leaman, *Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis*, alih bahasa Musa Kazhim dan Arief Mulayadi (Bandung: Mizan, 2002), 141.

⁴¹ Martin Suyrajana, *Sejarah Pemikiran Politik Klasik: Dari Prasejarah Hingga Abad ke-14 M* (Tangerang: Marjin Kiri, 2016), 164.

Setelah melihat bentuk-bentuk pemerintahan yang diakui dan yang menyimpang menurut Aristoteles, kita kemudian dapat melihat perbedaan pendapatnya dengan pendapat Plato dan Ibnu Rusyd. Pertanyaannya adalah, apabila yang dikomentari Ibnu Rusyd adalah *Politics* Aristoteles bukan *Republic* Plato apakah ia juga akan mengikuti pembagian pemerintahan menurut Aristoteles? Perlu kita ingat bahwa walaupun Ibnu Rusyd mengomentari *Republic* Plato, ia tidak sepenuhnya menyetujui ide politik Plato, dengan kata lain bahwa Ibnu Rusyd juga memiliki pandangan sendiri dalam filsafat politiknya. Seperti yang dikatakan al-Jabiri pada “Muqaddimah” *ad-Darûri fi as-Siyâsah* bahwa ia menyebut Ibnu Rusyd sebagai *partner* Plato dalam menulis kitab politik tersebut. Bahkan, al-Jabiri berpendapat bahwa Ibnu Rusyd telah ikut andil dalam menulis sepertiga dari kitab politik tersebut.⁴² Hal tersebut berarti bahwa jika ia mengomentari *Politics* Aristoteles sekalipun ia tetap memiliki pendapatnya sendiri yang ia yakini kebenarannya.

Dalam *Commentary on Plato's Republic*, Ibnu Rusyd menunjukkan berbagai contoh kasus di Andalusia yang bisa dipakai sebagai bentuk-bentuk pengandaian dari ragam organisasi politik yang dikemukakan Plato di atas. Perubahan bentuk pemerintahan yang terjadi di dunia muslim juga menjadi salah kritik Ibnu Rusyd terhadap pemerintahan kala itu. Kelima bentuk pemerintahan yang disebutkan di atas dapat mengalami pergeseran atau perubahan. Ibnu Rusyd, sebagaimana Plato mengatakan bahwa pemerintahan kota utama bisa saja berubah menjadi pemerintahan yang berbentuk timokrasi jika pemerintah atau pemimpinnya lebih mengejar kemuliaan atau derajat saja. Contoh yang terjadi di dalam dunia muslim adalah pada masa Mu'awiyah. Kekhalifahan yang dahulunya tidak mementingkan kehormatan atau kedudukan perlahan berubah menjadi timokrasi.⁴³

Hal yang serupa juga terjadi pada masa pemerintahan Dinasti al-Murâbithûn. Pada awal terbentuknya dinasti tersebut pemimpinnya menerapkan peraturan yang sesuai dengan hukum-hukum dan syari'at pada masa Yusuf bin Tashfin (465 H/1073 M). Kemudian pada masa pemerintahan anaknya, pemerintahan tersebut berganti menjadi timokrasi disebabkan kecintaannya terhadap harta. Keadaan pun semakin parah ketika pemerintahan dipegang oleh cucunya, pemerintahan berganti menjadi pemerintahan yang hedonis, dan begitu seterusnya hingga pemerintahan tersebut digantikan oleh Dinasti al-Muwahidun (541 H).⁴⁴

Berangkat dari penjelasan Ibnu Rusyd tentang etika dan kaitannya dengan ilmu politik, ia dapat menjelaskan secara baik bagaimana peran pemerintah seharusnya. Negara menurut pemahaman Ibnu Rusyd adalah jiwa dan masyarakat yang hidup di

⁴² Suryajana, *Sejarah Filsafat Politik Klasik*, 202.

⁴³ Âbid al-Jâbiri, "Muqaddimah" dalam kitab *al-arûri fi al-Siyâsah*, 56.

⁴⁴ Ibnu Rusyd berkata:

وأنت تتقف على الذى باله أفلاطون في تحول السياسة الفاضلة إلى السياسة الكرامية من سياسة العرب في الزمن القديم، لأنها حاكوا السياسة الفاضلة ثم تحولوا عنها أيام معاوية. و يشبه أن يكون الأمر كذلك في السياسة الموجودة اليوم في هذه الجزر (فقرة ٣٠١).

Ibnu Rusyd, *al-harûri fi al-Siyâsah*, 184.

dalamnya, bukan tanah, bangunan ataupun, buminya ataupun tempatnya. Kesejahteraan masyarakat adalah yang utama menurut Ibnu Rusyd. Bahkan Ibnu Rusyd adalah filsuf yang menyuarakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Ia mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama bahkan dalam hal menjadi seorang pemimpin. Perempuan (jika ia menginginkan) dapat mengikuti perang bersama laki-laki.⁴⁵

E. Kesimpulan

Ibnu Rusyd merupakan seorang filsuf muslim yang terkenal dengan pemikirannya yang sangat rasionalis. Pemikirannya banyak mengilhami kemajuan intelektual Barat, bahkan ia disebut-sebut sebagai seorang yang sangat berjasa atas kemajuan yang dirasakan Barat saat ini. Cara berfikir Ibnu Rusyd yang sangat filosofis dan sistematis mempengaruhi pemikirannya dalam ranah politik. Ibnu Rusyd tidak ingin pemikiran politik dalam Islam dipandang sebagai doktrin keagamaan saja, tetapi juga sebagai sebuah ilmu.

Ibnu Rusyd terkenal sebagai komentator handal untuk karya-karya Aristoteles, tetapi dalam bidang politik Ibnu Rusyd justru membahas secara terperinci pemikiran Plato. Dalam bukunya yang berjudul *ad-Darûri fî as-Siyâsah* yang merupakan komentar terhadap karya Plato, Ibnu Rusyd memberikan beberapa kritik, seperti banyaknya bahasa kiasan yang digunakan Plato dalam bukunya yang bisa saja menjadikan karyanya tidak lagi bersifat filosofis. Tetapi Ibnu Rusyd mengapresiasi penjelasan Plato yang terperinci tentang macam-macam pemerintahan. Kitab politik Ibnu Rusyd juga hadir untuk memberikan kritik terhadap pemerintahan di zamannya yang ia nilai telah melenceng dari tujuan bernegara yang benar.

Untuk memulai sistem pemikiran politiknya yang sistematis, Ibnu Rusyd mengawalinya dengan etika, serta kaitan politik dengan ilmu yang lain. Dari penjelasan tentang kaitan etika dan politik inilah, ia menarik asumsi bahwa persoalan politik adalah persoalan tentang kemanusiaan, bukan tentang negara dalam artian sebagai tempat, tanah atau bangunannya. Persoalan politik adalah persoalan kesejahteraan jiwa manusia yang ada di dalamnya, termasuk kebebasan masyarakat dalam memilih yang terbaik untuk mereka sendiri.⁴⁶ Satu hal yang membedakan Ibnu Rusyd dengan Plato dan

⁴⁵ *Ibid.*, 187-188

⁴⁶ Majid Fakhry, *Averroes: His Life, Works and Influence* (England: Oxford, 2001), 110.

⁴⁷ Masalah kebebasan manusia untuk memilih adalah topik klasik yang ramai diperbincangkan oleh para mutakallimun dalam bab *af'al al-'ibad*. Apakah manusia bebas memilih perbuatannya sendiri dalam hal baik dan buruk, atau Tuhanlah yang menentukan perbuatan baik dan buruk mereka. Dalam hal ini terdapat dua aliran aliran Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah berpendapat bahwa semua hal yang dilakukan manusia yang berkenaan dengan baik dan buruk sesungguhnya telah ditentukan oleh Tuhan, manusia tidak dapat memiliki kemampuan untuk memilih. Manusia diibaratkan seperti bulu yang bertebangan. Sedangkan kelompok Qadariyah berpendapat bahwa manusia sendirilah yang menciptakan kehendak mereka sendiri, Tuhan tidak berperan dalam menentukan perbuatan manusia. Kedua aliran ini terlihat ekstrim yang sama Jabariyah menafikan kehendak dan kemampuan manusia untuk memilih sedangkan Qadariyah menafikan kemampuan Tuhan untuk memberikan takdir kepada manusia. Asy'ari dengan teori kasabnya berniat untuk memberikan jalan tengah, bahwa manusia memiliki kehendak dan kemampuan

Aristoteles, bahwa keyakinannya terhadap konsep baik dan buruk yang telah ditentukan oleh Tuhan dengan jalan kenabian.

Selain itu, dalam beberapa hal Ibnu Rusyd memang memiliki kesamaan dengan Plato seperti definisi tentang keadilan, dan pemimpin kota utama. Tetapi dalam hal penggunaan metode sebagai analisis dalam filsafat politiknya, ia lebih mengutamakan metode demonstratif ala Aristoteles.

Daftar Pustaka

- Al-Ubaidi, Hamadi. *Ibnu Rusyd wa 'Ulum al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Dar Fikr al-'Arabi, 1991.
- 'Abid al-Jabiri, Muhammad. *Tragedi Intelektual: Perselingkuhan Politik dan Agama*, alih bahasa Zamzam Afandi Abdillah, Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003.
- Atif al-'Iraqi, Muhammad. *Metode Kritik Filsafat Ibnu Rusyd*, alih bahasa Aksin Wijaya, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Balustein, Michael. *The Scope and Methods of Rhetorical in Averroes' Middle Commentary on Aristotele's Rhetoric*, dalam *The Political Aspects of Islamic Philosophy*, Amerika Serikat: Harvard University, 1992.
- Budiono dan Kusumohamidjono. *Filsafat Politik Abad ke-21*, Yogyakarta: Jalasutra, 2014.
- Fauzan. "Pemikiran Politik Ibnu Rusyd", dalam *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Filsafat*, Vol. 9, Nomor 2, Desember 2015.
- Fakhry, Majid. *Averroes: His Life, Works and Influence*, England: Oxford, 2001.
- Fachruddin, Fuad. Mohd. *Filsafat Politik Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. *Filsafat politik Islam: Masa Klasik Hingga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibnu Rusyd, Abu Walid. *ad-D{arûri fi as-Siyâsah*, Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiah, 1998.
- _____, Abu Walid. *Tahafut al-Tahafut*, terj. Khalifurahman Fath, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- _____, Abu Walid. *Talkhis al-Siyasah*, Beirut: Dar al-Thali'ah, 1998.
- _____, Abu Walid. *Fashlu al-Maqal fima baina al-Hikmah wa al-Syari'ah min al-Ittishal*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1972.
- Leaman, Oliver. *Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis*, Terj. Musa Kazhim dan Arief Mulayadi, Bandung: Mizan, 2002.
- Lerner, Raphl. *Averroes on Plato's Republic*, New York, Cornell University Press, 1974.
- Magnis-Suseno, Franz, 2016. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia.

- Plato. *Republic*. Terj. Sylvester G. Sukur, Yogyakarta: Narasi, 2016.
- Rosenthal, Erwin, "The Place of Politics in the Philosophy of Ibn Rushd", *SOAS: Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London*, Vol, 15, Nomor 2, 1953.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI press, cet ke-5, 2011.
- Suryajana, Martin. *Sejarah Pemikiran Politik Klasik: Dari Prasejarah Hingga Abad ke-14 M*, Tangerang: Marjin Kiri, 2016.
- Suwaidan, Tariq, *Dari Puncak Andalusia* terj. Zainal Arifin (Jakarta: Zaman, 2015).
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern* terj. Ahmad Baidlowi dan Imam Baehaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Zar, Sirajuddin. *Filsafat Islam: Filsuf dan Filsafatnya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

